

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tangjung Jabung Barat

RENCANA KERJA 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 20 - 7 - 2022

KEPALA BAPENDA



SUGANTO, SE

Pembina

NIP 19670317 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	8
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
 BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan sesuai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, dimaksud sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran program yang direncanakan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
 - 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

TABEL 2.1
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2022 (thn n+1)	Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)		
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		5.1	5.3	7.98	8.06	8.06	9.77	8.06	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021 dari target 7.98% terealisasi 9.77%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			76.61	77	78.24	79	78.24	78.88	79	Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2021 dari target 78.24 terealisasi 78.88 dengan capaian kinerja 100.82%

2.2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

No	Saaran	3	4	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan) (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Misi/Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025) yang direvisi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisi tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisi tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direvisi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renja Perangkat Daerah old tahun 2022 (%)	Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab
								I	II	III	IV					
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KELUANGAN				107,192,596,000		10,337,129,773		10,899,755,646		1,183,373,709		3,102,380,205		14,622,883,687
1	Meningkatnya Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai ANP	63.00 70.00		79.00 68.00				0		78.88 60.85			13.64%
		PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Penetapan Penyediaan Komposisi Penyalang Pelayanan Publik	100%	73,278,146,000	8,963,300,796	8,108,897,423		8,963,300,796	0	885,349,948		2,536,865,795	11,531,113,076	15.74%
		Penataan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Penataan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	750,750,000	95,811,500	85,430,500	5 Dokumen	95,811,500	0	20,250,000	11 Dokumen	28,056,400	133,736,900	17.81%
		Penyusunan Dokumen Penataan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Penataan	32 Dokumen	465,750,000	62,749,000	57,761,000	4 Dokumen	62,749,000		13,125,000	10 Dokumen	18,469,400	89,355,400	19.19%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	72 Laporan	285,000,000	33,062,500	27,669,500	12 Laporan	33,062,500		7,125,000	18 Laporan	9,587,000	44,381,500	15.57%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51,288,000,000	7,201,487,048	6,287,360,448	1 Dokumen	7,201,487,048	0	683,923,504		2,585,278,125	8,882,638,565	17.30%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	339 Orang	48,350,000,000	7,007,277,048	6,035,773,940	55 Orang	7,007,277,048		648,623,504	55 Orang	1,845,064,621	8,530,862,085	17.64%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Materi Pokok Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang direvisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah sd tahun 2021 (Materi Pokok Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran rencana Perangkat Daerah sd tahun 2022 (%)	Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	15
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waku Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102 Orang	2,455,000,000	60 Laporan	233,000,000	60 Laporan	230,000,000	307,000,000	307,000,000	1,090,000,000	895,000,000	410,000,000	285,000,000	320,200,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Jurnal Keuangan SKPD	60 Laporan	233,000,000	60 Laporan	230,000,000	60 Laporan	230,000,000	307,000,000	307,000,000	1,090,000,000	895,000,000	410,000,000	285,000,000	320,200,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	72 Laporan	230,000,000	72 Laporan	230,000,000	72 Laporan	230,000,000	307,000,000	307,000,000	1,090,000,000	895,000,000	410,000,000	285,000,000	320,200,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	307,000,000	6 Dokumen	307,000,000	6 Dokumen	307,000,000	307,000,000	307,000,000	1,090,000,000	895,000,000	410,000,000	285,000,000	320,200,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	307,000,000	72 Laporan	307,000,000	72 Laporan	307,000,000	307,000,000	307,000,000	1,090,000,000	895,000,000	410,000,000	285,000,000	320,200,000
		Administrasi Kepegowmaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegowmaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1,090,000,000	6 Dokumen	1,090,000,000	6 Dokumen	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000
		Pengadaan Pakan Dinas Berserta Abut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Berserta Abut Kelengkapannya	848 stel	895,000,000	848 stel	895,000,000	848 stel	895,000,000	895,000,000	895,000,000	895,000,000	895,000,000	895,000,000	895,000,000	895,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan Fungsi	50 Orang	410,000,000	50 Orang	410,000,000	50 Orang	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000	410,000,000
		Sinergis Teknis Implementasi Penulayan Perunding-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	48 Orang	285,000,000	48 Orang	285,000,000	48 Orang	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	72 Bulan	8,131,700,000	72 Bulan	8,131,700,000	72 Bulan	8,131,700,000	8,131,700,000	8,131,700,000	8,131,700,000	8,131,700,000	8,131,700,000	8,131,700,000	8,131,700,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250 Buah	320,200,000	2.250 Buah	320,200,000	2.250 Buah	320,200,000	320,200,000	320,200,000	320,200,000	320,200,000	320,200,000	320,200,000	320,200,000

[illegible]

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Rastera Peringkat Daerah pada Tahun 2020 (Maka Periode Rastera Peringkat Daerah)	Rastera Capaian Kinerja Rastera Peringkat Daerah tahun 2021 (2021)	Tingkat Kinerja dan angaran Rastera Peringkat daerah tahun berjalan (2022) yang direvisi	Rastera Kinerja Pada Tahun				Rastera Capaian Kinerja angaran Rastera Peringkat Daerah yang direvisi tahun 2022	Rastera Capaian Kinerja dan angaran Rastera Peringkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi angaran rastera Peringkat daerah tahun 2022 (%)	Unit Peringkat daerah yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
6	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
21	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
22	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
23	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
25	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
26	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
27	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
28	Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD
29	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD
30	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	APBD
31	Penagihan Pajak Daerah	APBD
32	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	APBD
33	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
34	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENTJA 2022				RENTJA PERUBAHAN 2022				Sumber Dana	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Kebutuhan Dasar Pagar Indikatif	DPA 2022 Sebelum Perubahan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7	13
5.02		KEUANGAN			18,395,896,000	10,899,755,646				12,992,197,792	2,092,442,146	
5.02.01		PROGRAM PERUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	11,114,696,000	8,963,300,796	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	10,524,143,194	1,560,842,398	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	118,000,000	95,811,500	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	198,861,500	103,050,000	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	75,000,000	62,748,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	70,749,000	8,000,000	APBD
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	12 Laporan	43,000,000	33,062,500	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	128,112,500	95,050,000	APBD
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,259,000,000	7,201,497,048	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,236,417,048	34,920,000	
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	7,800,000,000	7,007,277,048	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	7,033,197,048	25,920,000	APBD
5.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Orang	380,000,000	194,220,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	203,220,000	9,000,000	APBD
5.02.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Jurnal Keuangan SKPD	12 Laporan	41,000,000		BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				APBD
			Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD	12 Laporan								
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12 Laporan	38,000,000		BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				APBD
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	54,000,000		BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
5.02.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	54,000,000		BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				APBD
5.02.01.2.05		Administrasi Kepagawelasan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepagawelasan Perangkat Daerah	1 Dokumen	265,000,000	54,800,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Kepagawelasan Perangkat Daerah	1 Dokumen	92,300,000	37,500,000	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	135 Stok	150,000,000	54,800,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelangkaan	1 Paket	92,300,000	37,500,000	APBD

No	Kode Kegiatan	Usanan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2022			DPA 2022	Lokasi	RENJA PERUBAHAN 2022			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Kebutuhan Dasar Pagi Indikator			Seselum Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	10 Orang	75,000,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			APBD
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 Orang	40,000,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			APBD
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,090,500,000	756,110,399	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	977,245,199	221,134,800
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	375 Buah	45,000,000	38,272,372	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	38,272,372	APBD
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perakitan dan Perlengkapan Kantor	4965 Buah	200,000,000	193,000,349	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	193,000,349	APBD
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	914 Kotak	38,000,000	34,600,000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34,600,000	APBD
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	25416 Buah	150,000,000	148,322,278	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	148,322,278	APBD
	5.02.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1600 Eksemplar	7,500,000	7,200,000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	7,200,000	APBD
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	650,000,000	334,715,400	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	655,850,200	APBD
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Unit	260,000,000	-	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1,090,237,598	
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	698,655,000	
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	20 Set	110,000,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang disediakan			
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya	70 Unit	150,000,000	-	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	391,379,598	APBD
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	371,196,000	255,373,849	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	279,373,849	24,000,000
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11,100,000	10,500,000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,500,000	APBD
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	256,096,000	188,096,000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	212,096,000	APBD
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	65,000,000	56,777,849	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56,777,849	APBD
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178 Unit	697,000,000	599,706,000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	649,706,000	50,000,000

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKAPITULASI 2022			DPA 2022		Lokasi	REKAPITULASI 2022			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Kebijakan Dasar Penguat Induktif	Selaku Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Capaian Kinerja Tahun 2022	Selaku Perubahan		
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	1 Unit	72,000,000	48,000,000	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48,000,000	APBD	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41 Unit	260,000,000	251,600,000	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	41 Unit	251,600,000	APBD	
	5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	13 Unit	5,000,000		BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara				
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120 Unit	185,000,000	184,140,000	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	234,140,000	APBD	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	175,000,000	115,968,000	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	115,968,000	APBD	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.38%	5,281,200,000	1,936,454,890	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8.06%	2,468,054,598		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	96,135,351,000	5,281,200,000	1,936,454,890	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	96,135,351,000	2,468,054,598		
	5.02.04.2.01.01	Pencananaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	150,000,000	27,746,171	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	27,746,171	APBD	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen 1 Produk Hukum	210,000,000	25,136,000	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	73,936,000	APBD	
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan Pajak Daerah	8 Kali	214,500,000	66,029,657	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	124,129,657	APBD	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	360,000,000	68,781,362	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	149,855,434	APBD	
	5.02.04.2.01.05	Pendidikan dan Penyebarluasan Cipta Pajak Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pendefinisian BPHTB Jumlah Pendidikan dan Pendefinisian Pajak Daerah	550 OPWP 1300 OPWP	475,000,000	257,162,860	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendidikan dan Pendefinisian Cipta Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	257,162,860	APBD	
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pendefinisian PBB P2	15000 OPWP				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	164,010,500	APBD	
	5.02.04.2.01.07	Pemilihan Pajak Bumi dan Bangunan Perolehan dan Perdikan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan Jumlah SSPD BPHTB yang ditetapkan	15000 SPPT PBB P2 550 SSPD BPHTB	860,000,000	132,108,040	BAPEIDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Objek Pajak yang Diwujudkan NJOP nya	2500 Obyek Pajak	132,108,040	APBD	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 20 - 7 - 2022

KEPALA BAPENDA,

 **SUGIANTO, SE**
Pembina
NIP. 19670317 199002 1 001